IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Iswanda Saputra[1], Arief Fadilah[2], Reby Hamdian[3]
[1),2), 3)] Dinas Perhubungan Kota Palembang
Email: iswanda.raya@gmail.com[1], arief005@gmail.com[2],Rebyhamdian@yahoo.co.id[3]

ABSTRACT

The implementation of the Palembang Mayor's Regulation 57 of 2016 concerning the Main Duties and Work Procedures at the Palembang City Transportation Service has not been effective and efficient because it is not supported by professional human resources and the processes and procedures are still convoluted and too bureaucratic. The formulation of the problem in this study is "How to Implement the Policy of Palembang Mayor Regulation 57 of 2016 concerning the Main Duties, Functions and Work Procedures by the Palembang City Transportation Service. The method of data collection was done through documentation studies, in-depth interviews and observations. While the analysis uses qualitative methods with an inductive analysis mindset balanced with rationalization of synthesis analysis. The knife of analysis uses Policy Concept Theory, Strategic Management. In the implementation of the Palembang Mayor's Regulation 57 of 2016 concerning the Main Duties of Functions and Work Procedures at the Palembang City Transportation Office, it has not been accompanied by continuous socialization and guidance, as well as continuous monitoring, monitoring and evaluation. The deployment of tasks to several units in implementing policies within one organization is only to provide specificity and form the expertise of the implementor.

Keywords: *Performance, Goverment Regulations, Public Policy.*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan peraturan Walikota Palembang nomor 57 tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan Teori Konsep Kebijakan, Manajemen Strategi. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut belum dibarengi dengan Sosialisasi dan Pembinaan yang berkesinambungan, serta Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Penyebaran tugas pada beberapa unit dalam implementasi kebijakan dalam satu organisasi hanya untuk memberikan kekhususan dan membentuk keahlian dari implementor.

Kata Kunci : *Kinerja, Peraturan Pemerintah, Kebijakan Publik.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan pelayanan publik. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini pemrintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Kepuasan merupakan kesan atau penilaian antara kinerja petugas penyedia layanan dengan harapan pelanggan. Jika kinerja pelayanan berada dibawah harapan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggan tidak puas dengan layanan yang diberikan. Sebaliknya jika kinerja memenuhi harapan, maka kemungkinan pelanggan merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk keperluan masyarakat pada suatu instansi pemerintahan harus sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara negara yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dari kinerja para pegawai dalam menjalankan tugas sehingga berbanding lurus dengan kinerja pelayanan dari organisasi atau instansi tersebut. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.

Tuntutan akan reformasi kinerja sumber daya yang berkualitas selaras dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 yaitu: “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik

yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Undang-Undang ASN terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas, dan pengembangan pemanfaatan potensi. Aturan menyangkut kinerja dan prestasi kepegawaian merupakan kewenangan pemerintah pusat, artinya undang-undang ASN merupakan keputusan dari pemerintah pusat, sehingga aturan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di instansi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan perannya, Aparatur Sipil Negara harus memberikan hasil kerja (kinerja) yang baik dalam perannya sebagai perencana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanan kebijakan dalam pelayanan publik yang profesional. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat agar lebih meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan kinerja dengan produktivitas yang baik dalam memberikan pelayanan, memberikan kualitas pelayanan yang baik dan prima, dimana ASN responsive serta responsibel dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dukungan dan komitmen, antara lain adanya kejelasan pelayanan yang diberikan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik, mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan. Untuk mengetahui tingkat kinerja suatu pegawai maupun organisasi maka di lakukan penilaian kinerja dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta visi dan misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif, efisien, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk mengetahui dan menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat pengguna jasa layanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan Kota Palembang, mempunyai Tugas Pokok yang

berpedoman pada Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi: 1)Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan; 2)Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan; 3)Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya; 4)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Lahirnya suatu pemerintahan dalam suatu negara karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya, sebagai pihak yang diperintah dalam satu posisi dan peran. Menurut Ndraha, (1997:73), bahwa pemerintah adalah badan yang memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat yang berbentuk jasa publik dan layanan sipil.

Kebijakan publik pada dasarnya meliputi keseluruhan aspek kehidupan baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan pengaturan mendistribusikan apa saja yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, menggali sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Santoso (1988:50) berpendapat bahwa kebijakan publik dapat diartikan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prakteknya mengandung suatu implikasi. Edward III (1980:2), berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat mencakup sekumpulan tindakan yang luas yaitu: menetapkan dan mengimplementasikan instruksi-instruksi, menentukan dana pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian, megumpulkan data,

menyerahkan informasi, menganalisa masalah-masalah, mengangkat dan menggaji, membentuk unit-unit organisasi, menentukan alternatif, merencanakan masa yang akan datang bermusyawarah dengan rakyat, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan aktifitas bisnis, dengan komisi legislatif, unit-unit birokrasi bahkan dengan negara-negara lain.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino, mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Edward III dalam Agustino, 2006:149).

Menurut model Merilee S. Grindle, (dalam Agustino, 2006:154), yang dikenal dengan "Implementation as A Political and Administrative Process", dimana menurut Grindle ada dua variable yag mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, (dalam Agustino, 2006:154) amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (Isi dari Kebijakan) dan Context Of Policy (Kontek dari Implementasi Kebijakan).

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pokok dari uraian di atas, bahwa salah satu keberhasilan dari kinerja Dinas/Instansi Daerah dapat dilihat pada Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan mengacu kepada pendapat pendapat Grindle.

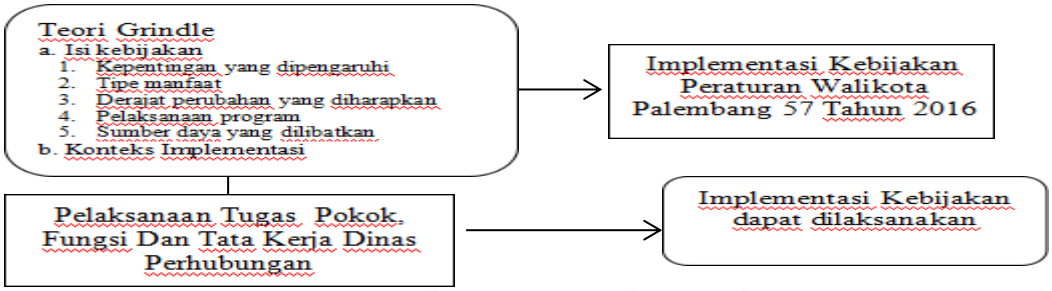

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Seperti:

1. Sebagai Implementor yaitu: Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang, Kepala Seksi
2. Kelompok sasaran adalah: Aparatur Sipil Negara dan Staf
3. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dishub..

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan denganKebijakan Pemeliharaan Lampu Jalan, serta data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:

a)Tahapan memasuki lapangan(getting in)
b)Tahapan ketika berada di lapangan (getting along)
c)Tahapan keluar dari Lapangan (getting out)

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu melalui: check, re-check dan crosscheck terhadap data yang diperoleh dari teori,metodologi dan persepsi peneliti.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan waktu penelitian selama 6 bulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

1. Analisis pada aspek isi kebijakan

Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator antara lain: indikator kepentingan yang dipengaruhi, indikator tipe manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan.

a. Kepentingan yang dipengaruhi

Analisis ini bertujuan untuk melihat isi atau kebijakan ini ketika dijalankan. Kepentingan yang dipengaruhi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran serta pemerintah dalam pelaksanaan Tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Peran serta tersebut terwujud melalui penyuluhan yang dilakukan kepada pegawai di setiap UPTD.

Pelaksanaan sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja mengandung dua kepentingan yang sejalan dengan penerapannya. Pertama kepentingan yang terdapat pada pemerintah sebagai sumber daya yang dilibatkan terutama para kader pelaksana program dan juga pemerintah daerah sendiri, mereka mempunyai kepentingan di dalam peran bagaimana mencapai keberhasilan didalam melaksanakan program dari kebijakan yang mereka rencanakan, kemudian kepentingan kedua yaitu kepentingan pegawai di setiap UPTD sebagai sasaran Tugas pokok. fungsi dan tata kerja. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja terdapat pada peran serta pemerintah dan staf pegawai dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan izin angkutan sungai dan danau di Kota Palembang, hal ini berarti bahwa pemerintah dan pegawai mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan program terutama sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka laksanakan sehingga Tugas pokok. fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang bisa berhasil.

b. Tipe manfaat

Analisis dari indikator tipe manfaat yaitu dengan melihat manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program terutama bagi pegawai setiap UPTD di Kota Palembang. Analisis ini bertujuan untuk melihat tipe atau jenis manfaat kebijakan bagi pegawai ketika dijalankan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang sangat memberikan manfaat dalam bidang ekonomi terutama dalam peningkatan

pendapatan daerah, serta terutama manfaat yang dirasakan bagi staf pegawai UPTD sebagai sasaran program.

c. Derajat perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan yang diharapkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dapat memberikan perubahan yang berarti bagi Kota Palembang. Perubahan yang diharapakan tentunya perubahan kearah yang lebih baik, dari semula tidak tahu menjadi tahu dan bagaimana perubahan tersebut dapat membawa manfaat yang berarti bagi pegawai maupun diharapkan bagi masyarakat luas. Adapun perubahan yang diharapkan yaitu adanya peningkatan derajat pengetahuan pegawai melalui pemahaman tugas pokok. fungsi dan tata kerja yaitu dari 66 orang pegawai pada UPTD-UPTD, 45 orang pegawai yang telah mengikuti sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Dengan adanya tugas pokok. fungsi dan tata kerja bagi pegawai dapat mengupayakan keterampilan dan pengetahuan pegawai bertambah Berikut harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi tugas pokok. fungsi dan tata kerja:

a. Terselenggaranya tugas pokok. fungsi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai tentang aset daerah.
b. Terselenggaranya pengataman, pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan peserta program.
c. Terselenggaranya tugas pokok. fungsi dan tata kerja dengan kesadaran sendiri.

2. Analisis pada Konteks Pelaksanaan Teknis Ijin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pelaksanaan program merupakan langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja melibatkan pemerintah dan staf pegawai, dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai sasaran program.

Pembahasan pada konteks implementasi dalam penelitian mengenai sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang dijelaskan dengan tiga indikator yaitu: analisis pada sub indikator kekuasaan kepentingan dan strategi, sub indicator kedua karakteristik lembaga dan penguasa serta sub indikator kepatuhan dan daya tanggap. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer berdasarkan

hasil wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan data sekunder.

a. Kekuasaan Kepentingan dan Strategi

Analisis ini bertujuan untuk melihat strategi lembaga dan penguasa dalam menerapkan kebijakan. Data berasal dari analisis hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang berhubungan dengan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi atas adanya upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana program.

Adapun kekuasaan kepentingan yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mengarahkan pegawai agar dapat penertiban aset sesuai dengan program yang mereka laksanakan. Sedangkan strategi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan bagaimana pegawai dapat dengan mudah melaksanakan program tanpa paksaan dan dari hati nurani mereka sendiri.

Strategi yang dilakukan pemerintah di Kota Palembang yaitu dengan mengupayakan penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang efektif kepada pegawai. Pegawai diarahkan agar mereka bisa menyadari dan tahu akan manfaat mengikuti tugas pokok, fungsi dan tata kerja untuk diri sendiri, UPTD maupun Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat mengupayakan dengan mandiri cara untuk mengikuti program demi kepentingan diri mereka sendiri.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi yang diterapkan dalam sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki strategi yang efektif dari cara - cara yang dilakukan pemerintah sehingga pegawai mau mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa paksaan. Strategi tersebut salah satunya dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai tergerak hati nuraninya untuk mengetahui Tugas pokok. fungsi dan tata kerja untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Analisis terhadap karakteristik lembaga dan penguasa sebagai indikator untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik pemerintah terutama para kader didalam melakukan penyuluhan – penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop dalam sosialisasi Tugas pokok. fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pembahasan penelitian ini dilihat dari sikap pernerintah dalam melakukan penyuluhan kepada pegawai, tentunya dengan sikap yang baik maka pegawai dapat mempunyai tanggapan yang dengan dengan maksud dan tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada pegawai dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara-cara yang baik kepada pegawai sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang dilaksanakan. Kepatuhan dan daya tanggap ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan program, karena tanpa kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan mengalami kendala karena pegawai tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka dapat mendukung pelaksanaan program dengan baik.

Pegawai mempunyai daya tanggap yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Mereka cukup mampu untuk menerima masukan dari pemerintah agar dapat tercapai tujuan program. Dari informasi wawancara yang didapat bahwa pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok. fungsi dan tata kerja, agar tercapai tujuan program dalam mengamankan aset-aset yang ada di Kota Palembang.

3. Analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada penelitian ini terdiri dari faktor yang memudahkan, faktor yang mendukung dan faktor yang memungkinkan.

3.1. Faktor yang mendorong

Faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dengan mudah kebijakan direalisasikan. Faktor yang

memudahkan ini dilihat dari indikator yang dijelaskan dalam pembahasan berikut:

a. Pendidikan

Secara teoritis, tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti pengetahuan dan keterampilan bagi diri dan lingkungan tempat bekerja di UPTD yang akan dapat menyelamatkan aset-aset milik pemerintah daerah. Semakin tinggi pendidikan pegawai lebih memungkinkan untuk cepat mengerti dan memahami materi yang disampaikan dalam penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk mngembangkan diri, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mudah untuk menerima serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang baik dapat mematangkan intelektual seseorang dan merupakan faktor penting dalam proses penyerapan informasi, peningkatan wawasan dan cara berfikir yang selanjutnya akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, persepsi, nilai-nilai dan sikap yang akan menentukan seseorang mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak. Pendidikan juga memberikan rasa percaya diri untuk mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak, juga memberikan rasa percaya diri untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab, termasuk tanggung jawab atas diri sendiri dan tanggung jawab pekerjaan.

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop yang ada di UPTD Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Palembang, dimana pendidikan juga dapat menentukan tingkat pemahaman pegawai terhadap program.

Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa tingginya pendidikan tidak selamanya berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi yang diberikan. Hal ini terlihat bahwa pegawai yang berpendidikan rendah juga mampu dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari materi yang diberikan dari penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

b. Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Apabila suatu tindakan didasari oleh pengetahuan maka perilaku tersebut akan bersikap langgeng, namun sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama. Pada dasarnya perilaku seseorang

dipengaruhi oleh pengetahuannya akan sesuatu hal. Demikian pula dengan pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimtek dan workshop, dimana seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang pekerjaan yang dihadapi akan cenderung lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan.

Pengetahuan dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa manusia, pengetahuan tidak akan tercipta dan berkembang, begitupun sebaliknya tanpa pengetahuan manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Begitu berartinya kedudukan pengetahuan dalam lingkungan kehidupan manusia, pengetahuan ini akan bisa membuat manusia menjadi tahu dan mengerti.

Hal ini juga berlaku pada pegawai selaku sasaran sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Pengetahuan pegawai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesediaan untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam pencapaian tujuan program penertiban aset-aset milik pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pegawai pada UPTD Dinas Perhubungan Kota Palembang cukup tinggi terhadap sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja baik. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah untuk melaksanakan Tugas pokok, fungsi dan tata kerja, sehingga dengan pengetahuan yang ada pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari pegawai. Mereka cukup paham dengan maksud dan tujuan adanya pelaksanaan penertiban aset-aset daerah

c. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana tanggapan pegawai terhadap pedoman teknis pembinaan dan retribusi ijin gangguan terutama mengenai sikap pegawai terhadap tugas pokok. fungsi dan tata kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pegawai terhadap Tugas pokok, fungsi dan tata kerja (Tugas pokok. fungsi dan tata kerja) di Kota Palembang mendapat tanggapan dan respon yang baik oleh pegawai, hal ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksakan program. Karena dengan sikap yang baik maka pemerintah dapat dengan mudah melaksanakan program dan rnendapat dukungan dari pegawai dan nantinya diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat.

3.2. Faktor yang menghambat

Faktor yang menghambat terlaksananya Tugas pokok, fungsi dan tata kerja dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana stimulan. Berikut pembahasan mengenai indikator tersebut: Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan program. Bila prasarana dan sarama tidak tersedia maka merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Dalam Tugas pokok. fungsi dan tata kerja sarana utama adalah alat dan prasarana penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop. Di samping penyediaan alat dan dukungan sarana dan prasarana lainnya diusahakan kelengkapan dan kesempurnaannya yaitu berupa mobil pelayanan, mobil penerangan dan tempat penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

3.3. Faktor Yang Memperkuat

Faktor yang memperkuat merupakan faktor - faktor yang memperkuat agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dapat berjalan dengan baik, faktor ini adalah pelaksanaan penyuluhan itu sendiri.

Penyuluhan mengenai program penertiban yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu kegiatan pemberian informasi oleh pemberi materi kepada pegawai tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu menolong dirinya sendiri beserta UPTD tempat mereka bekerja untuk selalu berbuat sesuai dengan standar yang berlaku.

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku individu pegawai, sehingga mampu serta ikut berperan serta dalam pembangunan dengan mengikuti Tugas pokok. fungsi dan tata kerja.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang terdiri dari 2 (dimensi) yaitu pelaksanaan program yang terdiri dari aspek isi kebijakan dan konteks kebijakan.

a). Isi kebijakan

- Kepentingan yang dipengaruhi; kepentingan dalam pelaksanaan perogram Tugas pokok. fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang terletak pada peran pemerintah dan pegawai dalam pelaksanaan program, dimana pemerintah sebagai pelaksana program melalui penyuluhan-penyuluhan,

bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan dan pegawai sebagai sasaran program.

- Tipe manfaat, pelaksanaan program memberikan manfaat kepada pegawai, lingkungan kerja di UPTD masing-masing dan diharapkan juga lingkungan masyarakat di Kota Palembang
- Derajat perubahan yang diharapkan, meliputi terselenggaranya Tugas pokok. fungsi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai tentang penertiban aset-aset daerah, terselenggaranya pelaksanaan program dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menolong dirinya sendiri dalam pekerjaan.
- Pelaksanaan program, pelaksanaan sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan oleh Petugas yang ahli dibidangnya.
- Sumber daya yang dilibatkan terdiri dari pemerintah, pegawai dan diharapkan dari masyarakat, serta sarana dan prasarana.

b). Konteks implementasi

- Kekuasaan kepentingan dan strategi yang dilakukan dalam sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki strategi yang efektif dari cara - cara yang dilakukan pemerintah sehingga pegawai mau mengikuti saran yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang bearti sehingga pegawai mampu untuk mrngikuti Tugas pokok. fungsi dan tata kerja.
- Karakteristik lembaga dan penguasa, pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada pegawai dengan memberikan penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara yang baik sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri.
- Kepatuhan dan daya tanggap, pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program.

2) Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang memudahkan, antara lain:

a. Pendidikan, tingkat pendidikan pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop cukup baik sehingga menjadi faktor pendukung pelaksanaan program.

b. Pengetahuan pegawai pada UPTD Kota Palembang terhadap penertiban aset-aset daerah cukup baik
c. Sikap yang muncul pada masyarakat dalam melaksanakan program dinilai cukup baik sehingga program dapat terlaksana.

2. Faktor yang menghambat.

a. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan Tugas pokok. fungsi dan tata kerja.

3. Faktor yang memperkuat.

a. Materi penyuluhan, bimbingan teknis serta workshop itu sendiri menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program.

2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh peneliti, maka hal yang dapat disarankan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja antara lain

a) Diharapkan peningkatan upaya promotif oleh petugas tentang ketertiban asset-aset milik pemerintah daerah kepada masyarakat yang menggunakan atau mendapat kepercayaan pemerintah untuk memelihara dan menjaga asset-aset daerah agar tidak diambil masyarakat umum kepemilikannya.
b) Perbaikan kualitas tentang pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop benar-benar orang atau pegawai yang dapat dan mampu, memahami serta termotivasi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketertiban administrasi asset-aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, M. Burhan, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana

Bungin, M. Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana

D. Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Cet.-2, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Danim, Sudarwan, 2005, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara

Gulick, Luther dan Urwick, L., eds, 1954, Papers on the Science of Administration, New York : Institute of Public Administration

Irianto, Agus, 2004, Statistik : Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Kencana

Kertapradja, E.Koswara, 2007, Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama

Kouzes, James M., et.al, 2006, A Leader's Legacy, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer

Krismantono, Dadi, Tantangan Menguatkan Proses, 2002, SWA .18 (23), Jakarta

Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Parsons, Wayne, 2006, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana

Santosa, Purbayu Budi, et.al, 2005, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS, Yogyakarta: Andi

Santoso, Singgih, 2008, Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Sudharmono, Johny, 2004, Be G2C : Good Governed Company, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Supriatna, Tjahya, 2007, Dimensi Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Suryanto,.Dwi, 2007, Transformational Leadership: Terobosan Baru Menjadi Pemimpin Unggul, Jakarta

Thoha, Miftah, 2002, Perspektif Perilaku Birokrasi, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jilid II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa

Varma, S.P., penyunting Tohir Effendi, 2007, Teori Politik Modern, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa

Vining, Aidan R.,et.al, Policy Analysis: Concepts and Practice, 1980, New Jersey: Prentice Hall

Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik: Teori & Proses, Yogyakarta: Media Presindo